

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2011-2015**

Skripsi



Oleh

Nama : Dedy Tulus Wicaksono

NomorMahasiswa : 14313023

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Dedy Tulus Wicaksono
Nomor Mahasiswa : 14313023
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat di tulis dengan sungguh-sungguh tanpa adanya plagiasi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dibuku pedoman penulisan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti persyataan ini tidak benar, maka saya siap untuk menerima hukuman/sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Penulis



Dedy Tulus Wicaksono

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi
Selatan Periode tahun 2011-2015

Nama : Dedy Tulus Wicaksono
Nomor Mahasiswa : 14313023
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta...15...Januari...2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Agus Widarjono, SE, M.A., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011-2015**

Disusun Oleh : **DEDY TULUS WICAKSONO**

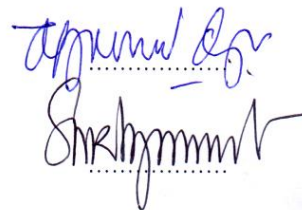
Nomor Mahasiswa : **14313023**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

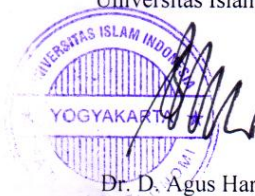
Pada hari Rabu, tanggal: 7 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

Penguji : Sarastri Mumpuni R. Dra., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Bersyukur atas apa yang kita raih dan dapatkan saat ini adalah mutlak, tapi visi kedepan untuk menjadi lebih baik serta mapan jangan sampai terlupakan”

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(QS.Al Baqarah:216)

“My mission in life is not merely to survive, but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.”

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi penelitian ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua saya Bapak Suyatno dan Ibu Supartini serta adik saya Andhini R.C. dan juga untuk para pengambil kebijakan di provinsi Sulawesi Selatan serta persembahan khusus untuk Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penulisan skripsi ini dimudahkan serta dilancarkan selesai sesuai pada waktu yang penulis harapkan. Sholawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015”** ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak bantuan, bimbingan, dan motivasi dari pihak-pihak, sehingga penulis dapat memecahkan persoalan yang muncul diatasi dengan baik. Selanjutnya melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah memberikan kemudahan, kekuatan, dan pertolongan dalam menjalankan kehidupan ini.

2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M.,M.Hum., PH.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Agus Widarjono, SE, M.A.,Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan bimbingan, kritikan, nasihat dan meluangkan waktu yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen, pegawai dan *staff* Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Suyatno dan Ibu Supartini yang tetap setia memberi dukungan, motivasi, dan doa dalam penyusunan penulisan skripsi ini, dan terimakasih untuk segala pengorbanan yang sudah diberikan untuk kesuksesan anaknya.
7. Saudaraku Andhini yang memberikan semangat dan keceriaan.
8. Teman seperjuangan dan sepermainan dari awal semester hingga sekarang yang terus mendukung hingga akhir: Ryan Setya Budi, Aditya Iswanto,Ahmad Aji Pangestu , Muhammad Nawwaf H.T, Muhammad Naufal H.T, Rini Budiarti dan Ayu Panca Febriana.
9. Teman Unit KKN 127 : Rama, Bobby, Irfan, andhini, Nur, Maria, Sarah dan Dira yang memberikan banyak pelajaran serta pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

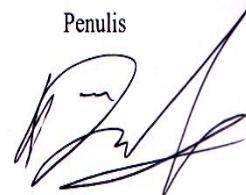
10. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang saling support menghadapi manis pahitnya menyusun skripsi.
11. Teman-teman satu angkatan Ilmu Ekonomi 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang sudah memberikan motivasi dan dukungannya.
12. Semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi yang belum dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dari penulisan yang masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dari segi isi maupun dari cara penyajian. Maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan berkarya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang mampu membantu dunia akademis dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan serta untuk pengembangan penelitian dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Desember 2017

Penulis



Dedy Tulus Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.5 Sistematika penulisan	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Ketimpangan	13
2.2.2 Distribusi pendapatan	14
2.2.3 Ukuran Ketimpangan distribusi pendapatan	17

2.2.4 Kemiskinan.....	20
2.2.5 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	22
2.2.6 Pengeluaran pemerintah	24
2.3 Pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat	25
2.3.1 Pengaruh Jumlah penduduk miskin terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan	25
2.3.2 Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis dan Sumber Data	30
3.2 Definisi operasional variabel	30
3.3 Analisis Regresi Data Panel	33
3.2.1 Metode Commonn Effect	33
3.2.2 Metode Fixed Effect	34
3.2.3 Metode Random	34
3.3 Pemilihan Model dalam pengolahan data	35
3.3.1 Uji Chow Test	35
3.3.2 Uji Lagrage Multipler (LM)	36
3.4 Pengujian Hipotesis.....	37
3.4.2 Uji f (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh).....	37
3.5 Koefisien Determinasi (R2)	38
BAB IV	40
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Diskriptif Analisis Variabel	40
4.1.1 Gambaran umum objek penelitian	40
4.2 Hasil Estimasi Panel.....	41
4.2.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	41
4.2.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	42
4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	45

4.3.1 Uji <i>Chow Test</i>	45
4.3.2 Uji <i>Hausmen Test</i>	46
4.4 Evaluasi Hasil Regresi	47
4.4.1 Uji kebaikan Garis Regresi (R^2).....	49
4.4.2 Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh (Uji F).....	50
4.4.3 Uji variabel secara individu (Uji T)	50
4.5 Hasil analisa pengaruh Jumlah penduduk miskin,PDRB dan Pengeluaran pemerintah terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan	52
4.5 Persamaan koefisien dan Intersep pembeda.....	53
BAB V.....	56
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Implikasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB provinsi di pulau Sulawesi.....	3
Tabel 1.2 Rasio Gini provinsi di pulau Sulawesi.....	4
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015.....	38
Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2015.....	38
Tabel 4.2.1 Output Hasil Uji Data Panel Dengan Common Effect Model.....	39
Tabel 4.2.2 Output Hasil Uji Data Panel Dengan Fixed Effect Model.....	40
Tabel 4.2.3 Output Hasil Uji Data Panel Dengan Random Effect Model.....	41
Tabel 4.3.1 Hasil Pengujian Chow Test.....	43
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Hausman Test.....	44
Tabel 4.4 Output Pengujian Model Regresi yang Terbaik (Fixed Effect).....	45
Tabel 4.4.1 Hasil Uji R dari Estimasi Fixed Effect.....	46
Tabel 4.4.2 Hasil Uji F dari estimasi Fixed Effect.....	47
Tabel 4.4.3 Hasil Statistik t-hitung.....	48
Tabel 4.5 Nilai Koefisien dan Intersep Sampel.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.....	28
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Data Jumlah penduduk perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam ribuan jiwa).....	58
Data Jumlah penduduk miskin perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam ribuan jiwa).....	59
Data PDRB harga kontan perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah).....	60
Data Pengeluaran pemerintah perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah).....	61

ABSTRAK

Pembangunan yang diterapkan di negara berkembang umumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Namun belum dapat mengatasi masalah sosial seperti ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks gini merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa besar tingkat ketimpangan antar wilayah. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ketimpangan. sehingga pemerintah memiliki peran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengelola serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi wilayah yang ada sehingga dapat meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Selain itu Pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi terhadap tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan pada tingkat Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita hasilnya positif dan signifikan berpengaruh. Sedangkan pengeluaran pemerintah hasilnya negatif dan signifikan berpengaruh. Namun untuk variabel Jumlah penduduk miskin hasilnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Ketimpangan, Indeks Gini, Penduduk miskin, PDRB perKapita, Pengeluaran Pemerintah*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan perekonomian yang merata di suatu negara. Namun dalam prosesnya terutama negara berkembang lebih mengutamakan masing-masing daerahnya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Gustav (1977) dalam penelitiannya *trade-off pessimism* menyatakan berdasarkan study empiris yang tersedia memperlihatkan adanya suatu konflik yang parah antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Secara garis besar menurut Sadono Sukirno (1985) Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan segala sumber daya yang ada.

Adanya permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut mengindikasikan ada proses yang salah dalam pembangunan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat bagaimana peningkatan perekonomian suatu wilayah. Apabila perekonomian itu bekerja dengan baik, maka hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat di nikmati secara adil dan merata bagi seluruh bagi seluruh pelaku ekonomi termasuk masyarakat. Dan bentuk dari peningkatan perekonomian tersebut tercermin langsung oleh pendapatan perkapita

masayarakat yang meningkat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) tidak mampu memecahkan permasalahan mendasar di negara berkembang, meskipun target pertumbuhan ekonomi telah pertahunnya telah tercapai. Lincoln Arsyad dalam bukunya mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan, sistem kelembagaan yang dimaksud adalah perbaikan segala bidang seperti ekonomi, hukum, sosial dan budaya (Arsyad, 2010). Namun proses kenaikan pendapatan secara terus menerus dalam jangka panjang tidaklah cukup untuk menandakan telah terjadi pembangunan ekonomi dengan baik. Perbaikan struktur sosial, kelembagaan dan perilaku masyarakat merupakan komponen terpenting serta tentunya dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. (Todaro & Smith, 2003).

Namun faktanya kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara terutama (NSB) Negara Sedang Berkembang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada ketimpangan pendapatan. Dalam bukunya Kuncoro menganjurkan NSB menerapkan strategi pertumbuhan dengan distribusi yang artinya NSB tidak hanya memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan distribusi pembangunan tersebut, dapat diwujudkan dengan kombinasi peningkatan kerja, investasi modal manusia, perhatian petani kesil dan sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah. (Kuncoro,1997:12) Namun ketimpangan pendapatan rupanya mempunyai dua dampak terhadap pembangunan

perekonomian daerah, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari ketimpangan adalah perekonomian yang tidak efisien, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan di pandang tidak adil. Dampak positifnya yaitu merangsang atau mendorong wilayah atau daerah lain untuk bersaing dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat (Todaro,2004)

Tabel 1.1

PDRB Provinsi di pulau Sulawesi tahun 2011-2015 (miliar rupiah)

PROVINSI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sulawesi Utara	59.910,90	58.677,59	62.442,50	66.359,42	70.418,81
Sulawesi Tengah	56.833,83	62.259,53	68.219,32	71.676,11	82.829,23
<i>Sulawesi Selatan</i>	<i>185.708,47</i>	<i>202.184,59</i>	<i>217.589,13</i>	<i>233.998,74</i>	<i>250.729,56</i>
Sulawesi Tenggara	53.546,69	59.785,40	64.268,71	68.290,56	72.988,30
Gorontalo	16.669,09	17.987,07	19.367,57	20.775,70	22.070,45
Sulawesi Barat	19.027,50	20.786,89	22.227,39	24.200,11	25.983,38

Sumber :Badan Pusat Statistik

Dari data tersebut dapat dinilai jika provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki PDRB tertinggi di pulau Sulawesi. PDRB tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun tingginya PDRB sulawesi dibarengi dengan tingkat ketimpangan provinsi yang sangat tinggi

Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan Indeks Gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketidak merataan agregat, koefisien gini diambil dari nama ahli statistika italia yang bernama C.Gini yang menemukan rumus tersebut tahun 1912. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (Ketidak merataan sempurna). Koefisien gini ketidak merataan sedang berkisar antara 0,36 – 0,49, ketidak merataan tinggi berkisar 0,50-0,70 dan ketidak merataan rendah berkisar antara 0,20-0,35.(Arsyad,2010:291)

Tabel 1.2

Rasio Gini Provinsi di pulau Sulawesi tahun 2011-2015

PROVINSI	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Sulawesi Utara	0.372	0.4285	0.434	0.43	0.367
Sulawesi Tengah	0.382	0.3935	0.399	0.362	0.372
<i>Sulawesi Selatan</i>	0.416	0.414	0.4305	0.4365	0.414
Sulawesi Tenggara	0.401	0.4035	0.4085	0.404	0.39
Sulawesi Barat	0.3565	0.325	0.3365	0.365	0.3625
Gorontalo	0.4295	0.425	0.441	0.4325	0.4105

Sumber :Badan Pusat Statistik

Bedasarkan tabel 1.2 tersebut di provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 tahun terakhir memiliki nilai rasio gini sebesar 0,43 tahun 2013, rasio gini sebesar 0,43 ditahun 2014 dan rasio gini sebesar 0,41 di tahun 2015 serta rasio gini sebesar 0,41 di

tahun 2016. Dari data tersebut rasio gini Sulawesi Selatan termasuk tinggi dari rata-rata ketimpangan nasional dan tertinggi ke empat setelah provinsi DIY, Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga atas dasar data tersebut provinsi Sulawesi selatan termasuk daerah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas adanya indikasi tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan hasil kajian empiris maka di perlukan penelitian yang lebih mendalam serta komprehensif terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan Di provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor- faktor yang mempengaruhi Ketimpangan tersebut. Maka penelitian tersebut di tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3 Tujuan

1. Untuk mengkaji besarnya pengaruh Jumlah penduduk miskin terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengkaji besarnya pengaruh PDRB terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengkaji besarnya pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota diprovinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

- a. Bagi penulis sendiri, menambah wawasan serta pengetahuan baru dan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
- b. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam menerapkan kebijakannya khususnya di provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan referensi dan informasi untuk pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Kajian pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi topik yang sama dan menjelaskan tentang perbedaan dengan penelitian ini dan Teori yang digunakan pada penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini membahas jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan cara pengolahan data secara terperinci.

Bab 4 Hasil dan Analisis

Pada bab ini membahas tentang pemaparan data dan hasil analisis data yang telah diolah

Bab 5 Kesimpulan dan Implikasi

Pada bab ini membahas kesimpulan dan hasil analisis serta implikasi jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Ilham Farih Muhaimin (2014). dalam penelitian yang berjudul Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2007 – 2011. Dengan variabel independen Inflasi, PDRB harga konstan, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan Kemiskinan. Data yang digunakan berupa data panel yang diperoleh dari BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa, variabel PDRB harga konstan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa dan variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

Benu Olfie dan Kapatow (2014). dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara periode 2005-2013. Dengan variabel independen berupa Jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini variabel Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi utara, sementara untuk variabel luas lahan pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara. Dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara.

Ani Nur Laili (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa periode tahun 2007-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PDRB Perkapita, Populasi penduduk, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan Desentralisasi fiskal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa, variabel Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa. Variabel Derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.

Ahmad Pauzi dan Dewa Nyoman Budiana (2016). Dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2009 -2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang berasal dari BPS provinsi. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi panel. Variabel independen yang di gunakan adalah Ekspor, PMA (Penanaman Modal Asing). Hasil dari penelitian ini adalah variabel Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Bali. Dan variabel PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali. Sedangkan untuk variabel Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali dan variabel PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/koata di provinsi Bali. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota provinsi Bali. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Bali.

Birgitta Dian Saraswati (2013). Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia periode tahun 2007-2012. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data Panel dengan variabel independen yang digunakan adalah Inflasi, Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Inflasi, Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia. Variabel inflasi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, sementara untuk variabel pendidikan dan pengeluaran

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia.

Yenni Del Rosa dan Ingra Sovita (2016). Dalam penelitian yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa periode tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan alat analisis Panel. Dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS . Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa variabel PDRB perkapita, Jumlah penduduk, TPT(Tingkat Pengangguran Terbuka) dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa, variabel TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa dan untuk variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada perbedaan penggunaan variabel seperti Jumlah penduduk miskin, PDRB Perkapita dan Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan metode ekonometrika yaitu analisis data panel dan diikuti perhitungan ketimpangan antar wilayah dengan perhitungan indikator *Indeks Williamson*. Serta adanya perbedaan objek dan periode tahun penelitian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan

Ketimpangan adalah mengacu pada standart hidup dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja atau sekelompok golongan tertentu dan tingkat ketimpangan sangat tinggi. (Kuncoro,1997:103)

Lincoln Arsyad berpendapat dalam masalah pemerataan merupakan suatu hal yang sangat kompleks demi mengatasi ketimpangan, karena sering sekali berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pemerataan sebagai suatu tujuan yang bernilai dengan adanya unsur yang erat hubungannya dengan keadilan sosial. Dalam upaya pencapaian pemerataan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Pertama yaitu pendanaan yang diperlukan sangatlah besar, adanya kendala anggaran disebagian NSB (Negara Sedang Berkembang) akan membatai ruang gerak bagi upaya pengurangan tingkat kesenjangan. Yang kedua yaitu tidak tepat sasaran, disebabkan terbatasnya interaksi antara pedesaan dan sektor informal dimana merupakan representasi golongan miskin dengan institusi formal misalnya pemerintah, dan yang ketiga adanya hambatan politik, dimana masyarakat golongan berpendapatan rendah seringkali memiliki kekuatan politik yang kecil dari pada golongan masyarakat berpendapatan tinggi. (Arsyad,2010:284)

Adelman dan Moris mengemukakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di NSB yaitu penambahan penduduk yang tinggi, inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti oleh secara proposional penambahan produksi barang-barang, investasi yang sangat banyak dalam proyek padat modal (capital intensive) sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar daripada yang berasal dari pekerjaan sehingga angka pengangguran bertambah, dan memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat adanya ketidakelestarian permintaan terhadap barang-barang NSB.(Arsyad,2010:284)

2.2.2 Distribusi pendapatan

Para ahli ekonomi membagi jenis distribusi pendapatan menjadi tiga jenis baik dengan tujuan analisis maupun kuantitatif.

1. Distribusi pendapatan perorangan.

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu maupun perorangan termasuk rumah tangga. Dalam indikator ini menjelaskan tentang hubungan antara individu- individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Tentang bagaimana cara pendapatan itu diperoleh tidak diperhatikan. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi atau apakah pendapatan itu diperoleh dari hasil kerjasama atau dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba, hadiah, warisan juga tidak diperhatikan. Lebih jauh lagi sumber yang bersifat lokasional (perkotaan dan pedesaan) dan okupasional (pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa) juga diabaikan.

2. Distribusi Fungsional

Distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan atas faktor produksi (*factor share distribution*). Indikator ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatab nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya memfokuskan perhatiannya pada persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha (faktor produksi) yang terpisah dan kemudian membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga dan laba masing-masing merupakan hasil perolehan atas faktor produksi tanah, modal dan kewirausahaan.

3. Distribusi Regional

Aspek keadilan dan pemerataan, selain dapat ditinjau berdasarkan distribusi perorangan dan fungsional dapat pula ditinjau berdsarkan distribusi reginal atau antar daerah. Misalnya, untuk kasus Indonesia distribusi pendapatan antar kabupaten, antarprovinsi, anatrjawa – luar Jawa untuk Indonesia, berdasarkan data yang ada tampak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah / daerah di Indoensia. Beberapa faktor penting yang diduga sebagai penyebab pendapatan anatar wilayah/daerah ini adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktu r dan kualitas sumber daya manusia yang bagus. (Arsyad,2010:288)

Terdapat tiga aspek pokok dalam proses distriibusi pendapatan untuk tujuan pemerataan pendapatan dan untuk masalah ketimpangan.

1. Distribusi Harta (Aset)

Pada dasarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan mencerminkan kepincangan dalam distribusi harta (aset), baik harta fisik misalnya modal, mesin produksi dll. Maupun harta non fisik misalnya keterampilan manusia. Kedua jenis harta ini akan menghasilkan (*income earning asset*), sehingga semakin banyak banyak harta yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula pendapatannya. Dengan demikian pola distribusi pendapatan yang sangat timpang mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup parah pada hartanya. Maka dalam upaya pendapatan hanya dapat dikerjakan secara efektif melalui distribusi harta baik fisik maupun non fisik. Pengalaman di berbagai negara upaya pemerataan melalui sistem pajak progresif dan subsidi kepada golongan miskin atau bisa disebut (*soft policies*) yang ternyata dalam jangka panjang tidak efektif, sehingga memerlukan kebijakan keras (*hard policies*) yang direpresentasikan oleh retribusi harta baik fisik maupun non fisik.

2. Strategi Pembangunan

Dewasa ini banyak kritik yang dilontarkan terhadap strategi pembangunan yang dianut oleh sebagian besar NSB. Strategi pembangunan diberbagai NSB lebih banyak mementingkan laju pertumbuhan ekonomi dan kurang mementingkan pemecahan efektif mengenai masalah pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Di beberapa NSB termasuk Indonesia tidak ada indikasi kuat untuk menunjukkan bahwa jumlah orang miskin telah berkurang, baik secara absolut maupun secara relatif. Tidak terlalu mengherakan karena strategi pembangunan yang ditempuh sebagian

besar NSB secara sadar atau tidak cenderung bersifat diskriminatif terhadap masyarakat berpendapatan rendah.

3. Kebijakan Fiskal

Disamping strategi pembangunan yang terkadang bersifat regresif, maka kebijakan fiskal termasuk kebijakan perpajakan sering pula bersifat regresif, meskipun diatas kertas perpajakan bersifat progresif. Namun dalam kenyataannya menurut (Tan, 1976) di Fhlipina dimana golongan keluarga paling miskin membayara 37 % dari seluruh pajak, sedangkan golongan berpendapatan menengah hanya sekitar 18%. Ini disebabkan karena sistem perpajakannya tidak membedakan golongan pendapatan. Keadaan di Indonesia kurang lebih tidak terlalu berbeda dengan fhilipina karena adanya inefisiensi dalam pemungutan pajak sehingga mereka seringkali tidak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. (Thee Kian Wie,1981)

2.2.3 Ukuran Ketimpangan distribusi pendapatan

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak Antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (tidak merataan sempurna). Koefisien Gini dari wilayah yang mengalami ketidak meratan tinggi berkisar antara 0,50- 0,70. Ketidak merataan sedang berkisar antara 0,36-0,49 dan yang mengalami ketidak merataan rendah berkisar antara 0,20-0,35.

2. Kriteria Bank Dunia

Kriteria bank dunia juga sering digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan 40% penduduk berpendapatan rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan tinggi bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan. Dikategorikan sedang bila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan. Dikategorikan rendah bila 40% penduduk berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. (Kuncoro,1997:139)

3. Indeks Williamson

Salah satu indikator yang biasa dan dianggap representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah (regional) adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan Jeffrey G. Williamson (1965). Williamson mengemukakan model **V_w** (indeks tertimbang terhadap jumlah penduduk) dan **V_{uw}** (tidak tertimbang) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan perkapita suatu negara pada kurun waktu tertentu. Karena jumlah penduduk masing-masing daerah sangat variatif, maka model ketimpangan tertimbang menjadi lebih relevan. Dengan demikian penjelasan tentang kecenderungan meningkat atau menurunnya ketimpangan dapat dijelaskan dengan memperhatikan besarnya penyebut atau pembagi dari penduduk daerah tersebut.

Dari perhitungan yang dilakukan di beberapa negara terlihat bahwa ketimpangan antar daerah cenderung berubah dan mengikuti trend yang berbentuk

U(*U-Shape*), dimana pada tahap awal pembangunan derajat ketimpangan pendapatan antar daerah cenderung meningkat, kemudian mengalami masa stabil dan seterusnya menjadi berkurang. Namun untuk negara-negara tertentu bentuk U tersebut tidak sepenuhnya berlaku, terdapat variasi tertentu yang bersifat khusus.

Berikut adalah formulasi dari Indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum i(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

V_w adalah indeks Williamson

Y_i adalah pendapatan perkapita ditingkat kabupaten/kota

Y adalah pendapatan perkapita provinsi

f_i adalah jumlah penduduk tingkat kabupaten/kota

n adalah jumlah penduduk provinsi

Hal ini berarti pada dasarnya indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis.

Ada tiga kriteria dalam perhitungan indeks Williamson ini, yaitu indeks jika indeks Williamson menunjukkan:

- Angka 0,0 sampai 0,2 maka ketidak merataannya rendah.
- Angka 0,21 sampai 0,35 maka ketidak merataannya sedang.
- Angka $> 0,35$ maka ketidak merataannya tinggi.

2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan dapat di definisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau suatu kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.(Bappenas,2002)

Menurut Ravallion (2001), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat yang layak untuk tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat.orang miskin umumnya tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan dan kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Di sisi lain, Fernandez (2001) menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek,antara lain:

- Aspek politik: tidak memiliki akses keproses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- Aspek sosial: tersingkir dari istitusi utama masyarakat yang ada.

- Aspek ekonomi: rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
- Aspek budaya atau nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek pendek dan mudah menyerah.

Kemiskinan mempunyai dua macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan Absolut, di mana pendapatan seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro dan Smith, 2003).

Kemiskinan Relatif, beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan tersebut masih jauh lebih rendah dari pada pendapatan masyarakat disekitarnya. Dalam konsep ini kemiskinan relatif bersifat dinamis dan akan selalu ada. Kincaid (1975) memandang kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial, semakin besar ketimpangan antara penghasilan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

2.2.5 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam kurun waktu tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Menurut Bank Indonesia(2015) PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi disuatu daerah dalam waktu tertentu baik atas harga berlaku maupun harga konstan. dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan PDRB harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan tahun dasar tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan. PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi daerah. Dan PDRB harga konstan untuk mengetahui kemampuan sumber daya alam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi harga.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan PDRB Perkapita yang merupakan cerminan keadaan ekonomi masyarakat secara lingkup makro. PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap penduduk dalam kurun waktu satu tahun. dalam menghitung PDRB Perkapita menggunakan rumus sebagai berikut.

$$**PDRB Perkapita = \frac{PDRB}{Jumlah Penduduk}**$$

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

- Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya triwulan atau satu tahun).dalam hal ini nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh dari input produksi, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaanya dalam produksi. Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompok dalam 17 lapangan usaha .

- Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk konsumsi rumah tangga, pemerintah, lembaga sosial, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan diskrepansi statistik, ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa.

- Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas faktor produksi yaitu upah atau

gaji, surplus usaha seperti bunga, neto, sewa tanah dan keuntungan lainya yang tidak diperhitungkan

2.2.6 Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagaian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno,2000) menjelaskan pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalanya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dari dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk nasional dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk regional. Dan tujuan dari kebijakan fiskal tersebut adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Keynes dalam Sadono Sukirno (2012) berpendapat bahwa peranan campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan dipasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kesetabilan kegiatan ekonomi yang tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lain akan menimbulkan dampak yang serius terhadap pengangguran dan tingkat harga.

2.3 Pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat

2.3.1 Pengaruh Jumlah penduduk miskin terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan

Jumlah penduduk miskin sangat berkaitan kaitanya dengan ketimpangan pendapatan. Dimulai dari seseorang yang terlahir didalam lingkungan keluarga kurang mampu dan biasanya cenderung memiliki Sumber Daya yang terbatas. Sehingga memiliki keterbatasan untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan akan berdampak pada rendahnya kualitas Sumber daya Manusia. Karena rendahnya pendidikan yang ditempuh maka individu tersebut kesulitan untuk bersaing mencari pekerjaan dalam kompetisi di sektor formal sehingga satu-satunya pilihan adalah pekerjaan informal. Dengan terbatasnya modal dan pengetahuan maka pekerjaan yang dijalankan hanya menghasilkan upah yang rendah. dan pada akhhirnya semakin banyak jumlah penduduk miskin maka semakin banyak pula masyarakat yang berpendapatan rendah. dan hal ini akan semakin memperlebar jarak ketimpangan pendapatan anantara golongan penduduk berpendapatan rendah dan golongan penduduk berpendapatan tinggi.

Serta dengan banyaknya jumlah penduduk miskin maka pendapatan dan penerimaan daerah akan berkurang, sehingga akan menghambat pembangunan berakibat menurunnya pendapatan daerah. Dan pada akhirnya terjadi ketimpanagn distribusi pendapatan antara wilayah yang semakin kentara.(Todaro,1998)

2.3.2 Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan

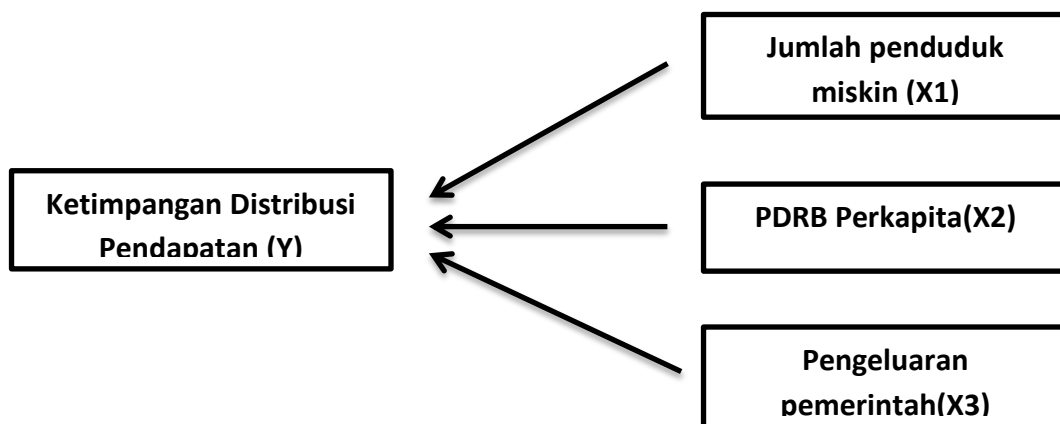
PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu wilayah regional atau daerah dalam periode tertentu. Bank Indonesia (2016) perkembangan perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia, maka setiap daerah akan memiliki jumlah PDRB yang berbeda. Semakin besar potensi sumber daya yang tersedia dan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi yang ada maka akan semakin besar pula PDRB wilayah tersebut. Dan PDRB yang tinggi menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun dalam hal ini (NSB) Negara Sedang Berkembang selalu memiliki malah terhadap pembangunanya, strategi pembangunan ekonomi di NSB selalu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi justru menyebabkan angka kemiskinan dan ketimpangan semakin meningkat. Ini sesuai dengan hipotesis Kuznets tentang kurva U terbalik. Yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun pada tahapan berikutnya distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan pendapatan perkapita. (Arsyad,2010:292)

2.3.3 Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi proses permintaan dan penawaran terhadap barang publik, dan tentunya hasil output produksi akan terserap oleh pengeluaran pemerintah. Misalnya pemerintah membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. Dengan anggaran belanja yang sudah tersedia, maka pemerintah melakukan permintaan terhadap segala kebutuhan untuk mendirikan infrastruktur tersebut. Atas tingginya permintaan tersebut para pelaku usaha terutama sektor swasta akan memperbanyak produksinya guna memenuhi permintaan yang ada. Dan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, perusahaan akan menambahkan alat produksi seperti mesin dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Dalam hal ini akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain serta juga penambahan sumber daya manusia atau tenaga kerja baru. Dan akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dan pendapatan karyawan perusahaan akan mengalami kenaikan pendapatan seiring dengan tingginya produksi perusahaan. Sehingga akan membantu dalam upaya pemerintah dalam pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pengamatan empiris Aldof Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang menunjukkan bahwa aktivitas dalam perekonomian cenderung meningkat, serta Wagner mengemukakan suatu teori bahwa pengeluaran pemerintah yang semakin besar akan berpengaruh terhadap persentase PDB.(Dumary,1997)

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan kerangka pemikiran pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikat.

Gambar 3.1
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga PDRB Perkapita berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan.

4. Diduga Jumlah penduduk miskin, PDRB Perkapita dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rincian data sebagai berikut

1. Data indeks Gini menurut propinsi di Indonesia periode tahun 2011- 2015.
2. Data Jumlah penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2011- 2015.
3. Data PDRB menurut atas harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2011-2015
4. Data Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2011-2015.
5. Data Pengeluaran pemerintah menurut kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2011- 2015.

3.2 Definisi operasional variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, tiga variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah ketimpangan distribusi pendapatan . Sementara untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah penduduk miskin, PDRB Perkapita dan Pengeluaran pemerintah.

a. Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan antar wilayah diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson. Indeks Williamson untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang.

Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah.

$$VW = \frac{\sqrt{\sum i(Y-Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

Yi : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

Y : PDRB Per kapita Provinsi DIY

Fi : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

n : Jumlah Penduduk Provinsi DIY

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson: Jika nilai I_w menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai I_w mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.

b. Jumlah penduduk miskin (x1)

Jumlah penduduk miskin merupakan banyak jumlah penduduk yang dibawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ribuan jiwa.

c. PDRB Perkapita (x2)

PDRB Perkapita merupakan indikator pertumbuhan ekonomi perkepala individu disuatu daerah dalam kurun waktu atau periode tertentu.

d. Pengeluaran pemerintah (x3)

Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran belanja yang telah tercantum dalam APBN untuk nasional dan APBD untuk regional atau daerah yang bertujuan untuk membiayai suatu kebijakan maupun proyek-proyek strategis pemerintah dalam kurun waktu periode tertentu. Dinyatakan dalam miliar rupiah.

3.3 Analisis Regresi Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi model data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Menurut (Widarjono, 2013: 354) Data panel merupakan data gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.2.1 Metode Common Effect

Metode *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. maka kita bisa menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya dalam bentuk linear adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.2.2 Metode Fixed Effect

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dan ketika terdapat heteroskedistisitas menggunakan *fixed effect* dengan *cross section weight*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + e_{it}$$

Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara variable independen namu intersepanya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar daerah dan antar waktu. (Widarjono, 2009 : 232)

3.2.3 Metode Random

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap provinsi mempunyai intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variable random. Model *random effect* ditulis dalam model regresi linear sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.3 Pemilihan Model dalam pengolahan data

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Untuk memutuskan model manakah yang paling tepat digunakan untuk penelitian ini akan digunakan pengujian yang formal yaitu Chow Test dan Hausmann Test.

3.3.1 Uji Chow Test

Uji chow test dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan pooled least square atau fixed effect. Hipotesis dari Chow test adalah:

- H_0 : F statistik < F tabel, maka model PLS yang valid digunakan
- H_1 : F statistik > F tabel, maka model fixed effect yang valid digunakan

Apabila nilai Chow statistik (F statistik) dari hasil pengujian lebih kecil dari F-tabel, maka hipotesis nol diterima. Sehingga model yang akan diterima dan digunakan adalah model PLS, begitu pula sebaliknya. Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan F- statistik seperti yang di rumuskan oleh chow

$$Chow = \frac{(RRSS - URSS) / (N - 1)}{URRS / (NT - N - K)}$$

Keterangan :

- RRSS = Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode Pooled Least Square/ common Intercept).
- URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel metode Fixed Effect Model)
- N = Jumlah data cross section
- T = Jumlah data time series
- K = Jumlah variabel penjelas

3.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan ujihipotesis:

1. H0 : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
2. H1 : memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*

Uji ini dilakukan dengan melihat *p-value*, apabila *p-value* signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Common Effect*, sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *Common Effect*.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Pengujian variabel secara individu (Uji T)

Uji t merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel atau dapat juga dilakukan dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan tertentu. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05 , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.. Sebaliknya, bila probabilitas > 0.05 , berarti independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.4.2 Uji f (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, jika $F_{hitung} >$

F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Bila dengan membandingkan probabilitasnya pada derajat keyakinan 5% maka bila probabilitas < 0.05, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, bila probabilitas > 0.05, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terhadap variabel dependen secara signifikan. Hipotesis yang digunakan

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$
- H_a : paling tidak terdapat satu β tidak sama dengan nol

3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. (Widarjono, 2009)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya semakin kecil nilai

R^2 , maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai observasi.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskriptif Analisis Variabel

4.1.1 Gambaran umum objek penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari time series tahun 2011-2015 dan crossection 21 Kabupaten 3 Kota meliputi Kepulauan Selayar, Bulukumba Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sindereng rapping, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Makassar, Pare-pare dan Palopo.

Dengan total luas wilayah 45764,53 km² provinsi Sulawesi selatan memiliki total penduduk 8.520.304 juta jiwa hingga tahun 2016. Dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi fokus utama pemerintah. Berikut merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1.1

PDRB Sulawesi Selatan tahun 2011-2015

TAHUN	PDRB
2011	59.785.40
2012	64.248.71
2013	68.291,71
2014	72.991,33
2015	91.070,55

Data tersebut merupakan PDRB harga kontan 2010 yang dapat mencerminkan kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Dimana setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 perekonomian selalu mengalami pertumbuhan. Namun kondisi tersebut juga di barengi dengan masalah Ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut merupakan perkembangan ketimpangan di Sulawesi selatan dengan rata-rata indeks ketimpangan melebihi ketimpangan nasional.

Tabel 4.1.2

Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2015

TAHUN	INDEKS GINI
2011	0.416
2012	0.414
2013	0.430
2014	0.436
2015	0.414

4.2 Hasil Estimasi Panel

4.2.1 Common Effect Model (CEM)

Output hasil dari uji regresi data panel dengan menggunakan metode *common effect model* sebagai berikut :

Tabel 4.3

Output Hasil Uji Data Panel Dengan *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 12/18/17 Time: 22:54				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 24				
Total pool (balanced) observations: 120				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.021562	0.143408	-7.123443	0.0000
LOG(X1?)	0.072004	0.017122	4.205336	0.0001
LOG(X2?)	0.153559	0.024168	6.353788	0.0000
LOG(X3?)	0.057958	0.030457	1.902905	0.0595
R-squared	0.543186	Mean dependent var		0.073529
Adjusted R-squared	0.531372	S.D. dependent var		0.118145
S.E. of regression	0.080878	Akaike info criterion		-2.158995
Sum squared resid	0.758777	Schwarz criterion		-2.066078
Log likelihood	133.5397	Hannan-Quinn criter.		-2.121261
F-statistic	45.97752	Durbin-Watson stat		0.061642
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: pengolahan Eviews 9

4.2.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Output hasil dari uji regresi data panel dengan menggunakan metode *fixed effect model* sebagai berikut:

Tabel 4.2

Output Hasil Uji Data Panel Dengan *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 12/18/17 Time: 22:55				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 24				
Total pool (balanced) observations: 120				

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035773	0.041387	0.864334	0.3896
LOG(X1?)	0.005488	0.010831	0.506669	0.6136
LOG(X2?)	0.091098	0.014093	6.464259	0.0000
LOG(X3?)	-0.038443	0.006012	-6.394190	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR--C	-0.065149			
_BULUKUMBA--C	0.039646			
_BANTAENG--C	-0.059034			
_JENEPONTO--C	0.055331			
_TAKALAR--C	0.013166			
_GOWA--C	0.095421			
_SINJAI--C	-0.057959			
_MAROS--C	-0.045506			
_PANGKEP--C	-0.005493			
_BARRU--C	-0.050439			
_BONE--C	-0.001669			
_SOPPENG--C	-0.056016			
_WAJO--C	-0.054793			
_SIDRAP--C	-0.049624			
_PINRANG--C	-0.075712			
_ENREKANG--C	-0.018370			
_LUWU--C	-0.034903			
_TANATORAJA--C	0.028387			
_LUWUUTARA--C	-0.026366			
_LUWUTIMUR--C	0.065281			
_TORAJAUTARA--C	0.004056			
_MAKASSAR--C	0.462407			
_PAREPARE--C	-0.077003			
_PALOPO--C	-0.085662			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998509	Mean dependent var	0.073529	
Adjusted R-squared	0.998092	S.D. dependent var	0.118145	
S.E. of regression	0.005160	Akaike info criterion	-7.500538	
Sum squared resid	0.002476	Schwarz criterion	-6.873353	
Log likelihood	477.0323	Hannan-Quinn criter.	-7.245835	
F-statistic	2395.546	Durbin-Watson stat	1.784027	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: pengolahan data dengan Eviews 9

4.2.3 Random Effect Model (REM)

Output hasil dari uji regresi data panel dengan menggunakan metode *random effect model* sebagai berikut :

Tabel 4.2.3

Output Hasil Uji Data Panel Dengan *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/18/17 Time: 22:58				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 24				
Total pool (balanced) observations: 120				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.017525	0.041784	-0.419412	0.6757
LOG(X1?)	0.019139	0.010089	1.897071	0.0603
LOG(X2?)	0.096916	0.013484	7.187679	0.0000
LOG(X3?)	-0.040023	0.005787	-6.916420	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR--C	-0.057222			
_BULUKUMBA--C	0.040137			
_BANTAENG--C	-0.051849			
_JENEPONTO--C	0.049178			
_TAKALAR--C	0.015863			
_GOWA—C	0.089313			
_SINJAI—C	-0.054264			
_MAROS--C	-0.051836			
_PANGKEP--C	-0.016881			
_BARRU--C	-0.042197			
_BONE—C	-0.014597			
_SOPPENG--C	-0.050816			
_WAJO—C	-0.056159			
_SIDRAP--C	-0.041793			
_PINRANG--C	-0.076321			
_ENREKANG--C	-0.016869			
_LUWU—C	-0.040993			
_TANATORAJA--C	0.030776			
_LUWUUTARA--C	-0.030649			
_LUWUTIMUR--C	0.065245			
_TORAJAUTARA--C	0.003099			
_MAKASSAR--C	0.446757			
_PAREPARE--C	-0.060621			
_PALOPO--C	-0.077300			
Effects Specification				

		S.D.	Rho
Cross-section random		0.074881	0.9953
Idiosyncratic random		0.005160	0.0047
Weighted Statistics			
R-squared	0.279021	Mean dependent var	0.002265
Adjusted R-squared	0.260375	S.D. dependent var	0.006606
S.E. of regression	0.005681	Sum squared resid	0.003744
F-statistic	14.96412	Durbin-Watson stat	1.186185
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.223995	Mean dependent var	0.073529
Sum squared resid	1.288959	Durbin-Watson stat	0.003446

Sumber: pengolahan data dengan Eviews 9

4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga pengujian model regresi *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* selanjutnya dilakukan pengujian untuk menentukan estimasi model regresi yang paling baik, berikut ini uji analisis yang dilakukan.

4.3.1 Uji Chow Test

Uji *chow test* digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah model yang akan dengan membandingkan antara model regresi *common effect* atau lebih baik menggunakan *fixed effect*. Untuk mengetahuinya dengan melihat uji F-statistik:

H_0 = *common effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*

H_a = *fixed effect model* lebih baik dari pada *common effect model*

Taraf signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05)

Dalam pengambilan keputusan uji *langrange multiplier* bisa dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan $< (\alpha = 5\%)$ maka model regresi

yang dipilih adalah *fixed effect*. namun apabila *p-value* tidak signifikan $>$ ($\alpha=5\%$) maka model regresi yang dipilih adalah *common effect*.

Tabel 4.3.1
Hasil Pengujian *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1234.860267	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	686.985230	23	0.0000

Sumber :Pengolahan data dengan Eviews 9

Dari hasil pengujian *chow test* didapatkan hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 686.985230 dengan probabilitas $0.0000 < \alpha 5\%$. Sehingga secara statistik menolak H_0 dan menerima H_a . Maka menurut estimasi model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

4.3.2 Uji *Hausmen Test*

Uji *hausmen test* digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah model yang akan dengan membandingkan antara model regresi *random effect* atau lebih baik menggunakan *fixed effect*. Untuk mengetahuinya dengan melihat uji *chi-squared*:

$H_0 = \text{random effect model lebih baik dari pada fixed effect model}$

$H_a = \text{fixed effect model lebih baik dari pada random effect model}$

Taraf signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05)

Dalam pengambilan keputusan uji *langrangge multiplier* bisa dilakukan dengan melihat *p-value* apabila signifikan $<$ ($\alpha =5\%$) maka model regresi

yang dipilih adalah *fixed effect*. namun apabila *p-value* tidak signifikan $> (\alpha=5\%)$ maka model regresi yang dipilih adalah *random effect*.

Tabel 4.3.2
Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.603866	3	0.0000

Sumber: pengolahan data dengan Eviews 9

Dari hasil pengujian *hausman test* didapatkan hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 27.603866 dengan probabilitas $0.0004 < \alpha 5\%$. Sehingga secara statistik menolak H_0 dan menerima H_a . Maka menurut estimasi model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

4.4 Evaluasi Hasil Regresi

Dari pengujian untuk menentukan mana model yang paling tepat dalam uji penelitian ini adalah mode *fixed effect*. Maka dalam mengetahui lebih lanjut mengevaluasi hasil regresi digunakan beberapa test yaitu uji kebaikan garis regresi (R^2), uji kelayakan model (Uji F) dan uji signifikansi (uji t).

Tabel 4.4
Output Pengujian Model Regresi yang Terbaik (*Fixed Effect*)

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 12/18/17 Time: 22:55				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 24				
Total pool (balanced) observations: 120				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	0.035773	0.041387	0.864334	0.3896
LOG(X1?)	0.005488	0.010831	0.506669	0.6136
LOG(X2?)	0.091098	0.014093	6.464259	0.0000
LOG(X3?)	-0.038443	0.006012	-6.394190	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR--C	-0.065149			
_BULUKUMBA--C	0.039646			
_BANTAENG—C	-0.059034			
_JENEPONTO--C	0.055331			
_TAKALAR—C	0.013166			
_GOWA—C	0.095421			
_SINJAI—C	-0.057959			
_MAROS—C	-0.045506			
_PANGKEP—C	-0.005493			
_BARRU—C	-0.050439			
_BONE—C	-0.001669			
_SOPPENG—C	-0.056016			
_WAJO—C	-0.054793			
_SIDRAP—C	-0.049624			
_PINRANG—C	-0.075712			
_ENREKANG—C	-0.018370			
_LUWU—C	-0.034903			
_TANATORAJA--C	0.028387			
_LUWUUTARA--C	-0.026366			
_LUWUTIMUR--C	0.065281			
_TORAJAUTARA--C	0.004056			
_MAKASSAR—C	0.462407			
_PAREPARE—C	-0.077003			
_PALOPO—C	-0.085662			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998509	Mean dependent var	0.073529	
Adjusted R-squared	0.998092	S.D. dependent var	0.118145	
S.E. of regression	0.005160	Akaike info criterion	-7.500538	
Sum squared resid	0.002476	Schwarz criterion	-6.873353	
Log likelihood	477.0323	Hannan-Quinn criter.	-7.245835	
F-statistic	2395.546	Durbin-Watson stat	1.784027	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: pengolahan data dengan Eviews 9

4.4.1 Uji kebaikan Garis Regresi (R^2)

Tabel 4.4.1

Hasil Uji kebaikan garis regresi dari Estimasi Fixed Effect

R –Squared	0.998509
Adjusted R-Square	0.998092
S.E. of regression	0.005160
F-Statistic	2395.546
Prob (F-Statistic)	0.000000

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya untuk mengukur persentase total variasi Y yang di jelaskan oleh aris garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktulanya. Semakin mendekati angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

Uji kebaikan garis regresi (R^2) digunakan dalam melihat apakah variabel independen yang dianalisis, sebesar apa dapat memberikan ukuran bahwa kedekatanya dengan garis regresi pada variabel dependen.

Nilai R^2 sebesar 0,998509 yang berarti bahwa sebanyak 99,85% dimana variasi variabel independen (Jumlah penduduk miskin, PDRB, dan Pengeluaran pemerintah.) dapat menjelaskan kedekatan dengan garis regresi pada variabel dependen (Ketimpangan distribusi pendapatan). Sedangkan sisanya sebesar 0,15% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh (Uji F)

Uji kelayakan model dengan metode OLS maka menggunakan uji F dimana untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diteliti apakah secara berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.4.2

Hasil Uji F dari estimasi *Fixed Effect*

R –Squared	0.998509
Adjusted R-Square	0.998092
S.E. of regression	0.005160
F-Statistic	2395.546
Prob (F-Statistic)	0.000000

Hasil uji data panel dengan model regresi model *fixed effect* memperoleh nilai F-statistik sebesar 2395.546 dan nilai probabilitas sebesar 0.000000 ($< \alpha$ 5%). Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara estimasi *fixed effect*. Keseluruhan variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.4.3 Uji variabel secara individu (Uji T)

Uji t dilakukan untuk menguji setiap individu apakah setiap masing-masing variabel independen dapat secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain tetap dan pengujian ini menguji arah keterkaitan dari nilai koefisiennya.

Tabel 4.4.3
Hasil Statistik t-hitung

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-statistik	Probabilitas	Keterangan
LOG(X1)	0.005488	0.010831	0.506669	0.6136	Tidak Signifikan
LOG(X2)	0.091098	0.014093	6.464259	0.0000	Signifikan
LOG(X3)	-0.038443	0.006012	-6.394190	0.0000	Signifikan

Sumber: data olah Eviews 9

a. Pengujian terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Koefisien variabel jumlah penduduk miskin adalah 0.005488 dengan t-statistik sebesar 0.506669 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,6136 (>10%) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X1 (penduduk miskin) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (ketimpangan distribusi pendapatan).

b. Pengujian terhadap PDRB

Koefisien variabel PDRB adalah 0.091098 dengan t-statistik sebesar 6.464259 sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (>5%) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel X2 (PDRB) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan distribusi pendapatan)

c. Pengujian terhadap Pengeluaran Pemerintah

Koefisien variabel Pengeluaran pemerintah adalah -0.038443 dan nilai t-statistik sebesar -6.394190 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (<5%) sehingga secara statistik menunjukkan variabel X3 (Pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan distribusi pendapatan)

4.5 Hasil analisa pengaruh Jumlah penduduk miskin,PDRB dan Pengeluaran pemerintah terhadap Ketimpangan distribusi pendapatan

Pada variabel X_1 (Jumlah penduduk miskin) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.005488 dan pada uji individu tidak signifikan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis awal. Tolak ukur kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah penduduk miskin. BPS menggunakan 3 indikator kemiskinan yaitu *Head Count Indeks*, yaitu persentase atau jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. *Proverty Gap Indeks* / Indeks Kedalaman kemiskinan, yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Proverty Severity Indeks* / Indeks Keparahan Kemiskinan yaitu gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada variabel X_2 (PDRB perkapita) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.091098 dan pada uji individu signifikan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal. Jadi apabila PDRB perkapita mengalami kenaikan 1% maka akan menaikkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.091098. Maka apabila PDRB perkapita mengalami peningkatan maka akan semakin menambah ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.091098. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan Ani Nurlaili (2016), Susi Lestari (2016) dan Yeni Del Rosa, Ingara Sovita (2016) dimana variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Pada variabel X_3 (Pengeluaran Pemerintah) yang memiliki nilai koefisien sebesar -0.038443 dan pada uji individu berpengaruh negatif dan signifikan, dimana hal ini sesuai dengan hipotesis awal. Jadi apabila Pengeluaran pemerintah naik 1% maka akan menurunkan angka Ketimpangan Distribusi pendapatan sebesar 0.038443. Maka dari itu jika jumlah Pengeluaran

pemerintah semakin ditingkatkan maka Indeks Gini/ Ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan akan menurun sebesar 0.038443.

Dengan semakin besarnya pengeluaran pemerintah maka akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pengeluaran pemerintah menjadi pendorong produktifitas unit-unit usaha di daerah tersebut karena output yang dihasilkan oleh industri besar maupun UKM (Usaha Kecil Mikro) akan lebih banyak terserap. Sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Dimas Wahyu Setyawan (2016), Syahida Syita (2017), Ketut Wahyu Dhyatmika(, Hastarini Dwi Atmanti (2013) dimana variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

4.5 Persamaan koefisien dan Intersep pembeda

Intersep yang dimiliki masing-masing *cross section* diyakini bahwa pada setiap kabupaten/Kota pada penelitian ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam pengimplementasian variabel bebas dalam peran menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan. Seperti pada Tabel 4.6 dimana setelah penjumlahan antara intersep dan koefisien didapatkan hasil bahwa terdapat tiga daerah Kabupaten/Kota yang memiliki nilai konstanta paling tinggi yaitu pada Kota Makassar sebesar 0,498180 Kabupaten Gowa sebesar 0,131194 dan Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,101054. Maka dapat disimpulkan dari ketiga Kabupaten/Kota tersebut dapat diasumsikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menurunkan Ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya terdapat tiga Kabupaten/Kota yang memiliki nilai konstanta paling rendah, yaitu

Kabupaten Palopo sebesar -0,049889, Kota Pare-pare sebesar -0,041230 dan Kabupaten Pinrang sebesar -0,039939. Dari ketiga Kabupaten/Kota tersebut diasumsikan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat menurunkan Ketimpangan distribusi pendapatan.

Tabel 4.5
Nilai Koefisien dan Intersep Sampel

Kabupaten/Kota	Intersep	Koefisien	Konstanta
		0.035773	
Kep.Selayar	-0.065149		-0.029376
Bulukumba	0.039646		0.075419
Bantaeng	-0.059034		-0.023261
Janeponto	0.055331		0.091104
Takalar	0.013166		0.048939
Gowa	0.095421		0.131194
Sinjai	-0.057959		-0.022186
Maros	-0.045506		-0.009733
Pangkep	-0.005493		0.030280
Barru	-0.050439		-0.014666
Bone	-0.001669		0.034104
Soppeng	-0.056016		-0.020243
Wajo	-0.054793		-0.019020
Sidrap	-0.049624		-0.013851
Pinrang	-0.075712		-0.039939
Enrekang	-0.01837		0.017403
Luwu	-0.034903		0.000870
Tanatoraja	0.028387		0.064160

Luwu Utara	-0.026366		0.009407
Luwu Timur	0.065281		0.101054
Toraja Utara	0.004056		0.039829
Makassar	0.462407		0.498180
Pare pare	-0.077003		-0.041230
Palopo	-0.085662		-0.049889

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai tentang analisis ketimpangan distribusi pendapatan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti bahwa Jumlah penduduk miskin tidak dapat membuktikan keterkaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
2. PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Yang berarti bahwa PDRB dapat membuktikan keterkaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.

5.2 Implikasi

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sebaiknya pemerintah membuat strategi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemecahan masalah ketimpangan serta kemiskinan,

tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat berpendapatan tinggi.

2. Berupaya berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur dan perbaikan sumber daya manusia terutama didaerah yang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan tidak hanya terpusat dikota-kota besar, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah atau daerah diprovinsi sulawesi selatan.
3. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dengan melakukan kebijakan dan pembangunan proyek strategis akan membantu menyerapan output produksi. Sehingga akan meningkatkan produktifitas terutama sektor swasta baik itu UMKM maupun produsen sedang. yang akan berpacu untuk memenuhi permintaan dari masifnya pelaksanaan proyek pemerintah. dan tentunya dengan tingginya produksi tersebut akan berpengaruh ke pendapatan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN.hal 11-20.

Koncoro, Mudrajad., (1997). *Ekonomika Pembangunan* Edisi 4, Yogyakarta: STIE YKPN.hal 111-117.

Dimas Wahyu Setyanwan. 2016.”Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Benu Olfi L Suzana dan Gene H M Kapantow. 2014.”Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara tahun 2005-2013”.*e jurnal*. Hal 21-32.

Ilham Farih Muhaimin (2014),Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2007 – 2011. *Skripsi* sarjana jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.hal 37-40.

Widarjono, Agus (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* Edisi 4, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal 353-368.

Todaro, Michel P dan Smit, Stephen P (2011). *Pembangunan Ekonomi* Edisi 11, Jakarta: Erlangga, hal 250-264.

M.L Jhingan (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 20-36.

Ani Nur Laili. 2016.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dipulau Jawa tahun 2007-2013”.*Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal 41-64.

Galaxi Chrisamba dan Birgitta Dian Saraswati.2013.”Analisis ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia”.*Jurnal*.Universitas Kristen Satya Wacana. Hal 2-10.

Yeni Del Rosa dan Ingra Sovita.2016.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa.”Jurnal.Universitas Dharma Andalas Padang. Hal 1-12.

Badan Pusat Statistik Database, diakses 20 Oktober 2017, dari <http://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan Database, diakses 12 Oktober 2017, dari <http://www.sulsel.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik. (2015). “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia, (2010-2015)”, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2016). “Jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (2011-2015)”, Badan Pusat Statistik. Sulawesi .

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2016). “Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka,(2011-2016)” Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan.Makassar

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Database, diakses 2 November 2017, dari http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316

LAMPIRAN

Data Jumlah penduduk perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (jiwa)

Kabupaten/kota	tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kep.Selayar	123.283	124.553	127.220	128.744	130.199
Bulukumba	398.531	400.990	404.896	407.775	410.485
Bantaeng	178.477	179.505	181.006	182.283	183.386
Jeneponto	346.149	348.138	351.111	353.287	355.599
Takalar	272.316	275.034	280.590	283.762	286.906
Gowa	659.512	670.465	696.096	709.386	722.702
Sinjai	231.182	232.612	234.886	236.497	238.099
Maros	322.212	325.401	331.796	335.596	339.300
Pangkep	308.814	311.604	317.110	320.293	323.597
Barru	167.653	168.034	169.302	170.316	171.217
Bone	724.905	728.737	734.119	738.515	742.912
Sopeng	226.079	226.202	225.512	225.709	226.116
Wajo	388.985	389.552	390.603	319.980	393.218
Sidrap	274.648	277.451	283.307	286.610	289.787
Pinrang	354.652	357.095	361.293	364.087	366.789
Enrekang	192.163	193.683	196.394	198.194	199.998
Luwu	335.828	338.609	343.793	347.096	350.218
Tana Toraja	223.306	224.523	226.212	227.588	228.984
Luwu Utara	290.365	292.765	297.313	299.989	302.687
Luwu Timur	245.515	250.608	263.012	269.405	275.595
Toraja Utara	218.943	220.304	222.393	224.003	225.516
Makassar	1,352.136	1,369.606	1,408.072	1,429.242	1,449.401
Pare-pare	130.563	132.048	135.192	136.903	138.699
Palopo	149.421	152.703	160.819	164.903	168.894
Sulawesi Selatan	8,115.638	8,190.222	8,324.047	8,432.163	8,520.304

Data Jumlah penduduk miskin perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam ribuan jiwa)

Kabupaten/kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kep.Selayar	16,67	16,11	18,2	16,95	16,9
Bulukumba	32,42	31,25	36,70	34,19	33,40
Bantaeng	16,48	15,91	18,90	17,66	17,60
Jeneponto	59,56	57,49	59,10	54,15	53,90
Takalar	27,41	26,43	29,30	27,37	27,10
Gowa	56,56	54,60	61,00	57,03	59,50
Sinjai	22,31	21,51	24,30	22,63	22,00
Maros	42,22	40,90	43,10	40,13	40,10
Pangkep	53,73	51,80	56,40	52,60	59,30
Barru	16,12	15,53	17,50	16,60	16,10
Bone	92,08	88,84	87,70	80,46	75,00
Sopeng	21,22	20,45	21,30	19,78	18,90
Wajo	31,42	30,29	31,90	30,34	30,10
Sidrap	17,30	16,69	17,90	16,72	16,00
Pinrang	28,87	27,88	32,10	29,92	30,50
Enrekang	29,23	29,17	29,70	27,60	27,60
Luwu	46,90	45,24	52,00	48,53	48,60
Tana Toraja	29,60	28,55	31,30	29,09	28,60
Luwu Utara	42,62	41,09	46,20	43,02	41,90
Luwu Timur	20,40	19,68	22,20	20,78	19,70
Toraja Utara	37,43	36,08	36,80	33,88	34,40
Makassar	71,67	69,17	66,40	64,23	63,20
Pare-pare	7,74	7,43	8,60	8,07	8,40
Palopo	15,30	14,76	15,50	14,59	14,50
Sulawesi Selatan	835,51	805,90	863,20	806,35	797,70

Data PDRB harga konstan 2010 perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (dalam miliar rupiah)

Kabupaten/kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kep.Selayar	1,967.83	2,122.81	2,317.79	2,530.65	2,723.95
Bulukumba	5,000.76	5,483.24	5,909.29	6,413.70	6,773.59
Bantaeng	2,949.29	3,234.46	3,525.28	3,819.28	4,072.58
Jeneponto	3,856.30	4,147.46	4,422.90	4,773.64	5,085.25
Takalar	3,573.90	3,809.14	4,144.29	4,548.62	4,930.88
Gowa	7,664.51	8,289.11	9,070.00	9,720.17	10,379.84
Sinjai	4,069.01	4,366.71	4,706.67	5,035.30	5,414.78
Maros	8,137.59	9,044.51	9,612.96	10,066.82	10,930.22
Pangkep	9,503.81	10,288.64	11,248.48	12,419.76	13,408.20
Barru	2,768.52	3,000.72	3,237.00	3,474.78	3,694.09
Bone	11,763.80	12,730.12	13,531.85	14,821.38	16,050.61
Sopeng	3,983.42	4,259.55	4,567.54	4,882.19	5,131.02
Wajo	8,280.58	8,819.11	9,428.97	10,341.08	11,069.65
Sidrap	4,863.45	5,297.54	5,664.56	6,110.20	6,597.66
Pinrang	7,104.14	7,708.90	8,269.61	8,940.48	9,677.08
Enrekang	2,815.55	3,021.20	3,197.50	3,389.15	3,622.71
Luwu	5,528.31	5,915.10	6,372.70	6,934.03	7,437.12
Tana Toraja	2,572.92	2,793.72	2,994.47	3,198.12	3,416.76
Luwu Utara	4,597.71	4,911.00	5,274.16	5,739.51	6,121.92
Luwu Timur	11,326.59	11,963.26	12,717.28	13,748.02	14,632.06
Toraja Utara	2,715.13	2,971.71	3,261.13	3,510.36	3,779.01
Makassar	64,622.10	70,851.04	76,907.41	82,592.00	88,750.16
Pare-pare	2,895.48	3,150.26	3,400.55	3,615.90	3,842.88
Palopo	3,143.19	3,363.25	3,633.01	3,889.24	4,140.24
Sulawesi Selatan	185,708.47	201,524.58	217,393.64	234,487.91	251,682.24

**Data Pengeluaran Pemerintah perKabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah)**

Kabupaten/kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kep.Selayar	471.412	501.389	632.885	709.384	750.964
Bulukumba	704.809	723.090	853.715	1.021.219	1.370.710
Bantaeng	358.045	461.337	613.503	632.311	775.40
Jeneponto	549.384	660.981	753.031	870.317	1.119.660
Takalar	533.794	645.227	692.729	807.031	964.299
Gowa	709.774	830.317	1.038.222	1.235.354	1.472.120
Sinjai	532.224	565.791	644.523	784.689	926.688
Maros	572.131	693.647	930.312	1.036.597	1.119.660
Pangkep	643.99	754.176	880.828	1.038.606	1.230.757
Barru	529.690	497.742	603.279	709.108	883.640
Bone	912.743	1.209.129	1.362.069	1.507.255	1.841.775
Sopeng	575.448	635.946	699.041	823.228	997.459
Wajo	757.403	870.797	1.013.317	1.113.790	1.251.469
Sidrap	725.813	658.927	749.016	853.108	1.044.498
Pinrang	621.893	702.498	804.968	920.524	1.155.529
Enrekang	507.885	558.605	631.347	699.198	903.110
Luwu	548.303	630.136	768.294	885.152	1.145.226
Tana Toraja	485.663	619.860	655.495	755.737	905.654
Luwu Utara	567.361	693.210	744.358	814.839	1.078.436
Luwu Timur	606.731	730.843	831.271	980.364	1.185.958
Toraja Utara	428.386	526.216	622.176	695.764	808.925
Makassar	1.588.046	1.768.525	2.072.658	2.381.719	3.062.274
Pare-pare	575.267	552.412	639.020	651.257	784.187
Palopo	478.375	489.168	557.935	669.570	761.974
Sulawesi Selatan	2.972.278	4.760.942	5.644.397	5.839.377	6.149.604